



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2022**



Jl. Lawu No. 167 Tegalgede, Karanganyar



(0271) 495063



www.dp3appkb.karanganyarkab.go.id

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Gambaran Umum.....	10
1. Tugas Pokok dan Fungsi	10
2. Struktur Organisasi	11
3. Sumber Daya	12
C. Isu Strategis.....	15
D. Dasar Hukum.....	15
E. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
PERENCANAAN KINERJA	19
A. Perencanaan Strategis	19
B. Program Unggulan	22
1. Program Umum/Rutin	22
2. Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	23
C. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja.....	28
D. Program Untuk Pencapaian Sasaran	30
E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	31
F. Perjanjian Kinerja (PK) 2022	31
G. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.....	32
BAB III.....	33
AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Metode Pengukuran.....	33
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	35
C. Analisis Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran	39
D. Akuntabilitas Anggaran	47
BAB IV	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja	75
B. Progres Penyelesaian Isu Strategis.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kualifikasi Pendidikan Formal Pegawai	13
Tabel 1.2 Kualifikasi Pangkat, Gol/Ruang Pegawai.....	14
Tabel 1.3 Sumber Daya Modal	14
Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	20
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023	21
Tabel 2.3 Skema Misi, Tujuan Dan Sasaran Serta Indikator Kinerja	29
Tabel 2.4 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....	30
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian	34
Tabel 3.2 Sumber Penilaian Indikator Kinerja	35
Tabel 3.3 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama DP3APKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.....	36
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi IKU dari tahun 2018-2022	37
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi IKU dari tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah (RPJMD).....	38
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran DP3APKB Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2022	49
Tabel 3.7 Analisa Efisiensi Dan Efektif Tahun Anggaran 2022 Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2022.....	62
Tabel 3.8 Realisasi Capaian Program Tahun 2022	73

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban setelah pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar serta dapat diketahui apakah program kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar pada tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dan visi – misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Demikian, semoga dokumen LKjIPDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amiin.

Karanganyar, Januari 2023

KEPALA DP3APPKB

KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. AGAM BINTORO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650601 199203 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2022 secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2022, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar adalah **“Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang, Kesenjangan Gender dan Perlindungan perempuan dan Anak”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja / Perjanjian kinerja Tahun 2022 untuk mencapai Sasaran Strategis pada seluruh kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assesment*) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan mencapai nilai kinerja yang dikategorikan baik.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Sedangkan, upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan-urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri dari pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan adalah upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan yang ditandai dengan indeks pembangunan dan pemberdayaan gender, upaya pemenuhan hak-hak anak sedangkan perlindungan perempuan dan anak merupakan upaya preventif dan rehabilitasi kasus kekerasan melalui pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menitikberatkan pada kesehatan reproduksi melalui pendekatan pendewasaan usia perkawinan dan keluarga berencana itu sendiri melalui pendekatan PUS sebagai peserta aktif keluarga berencana.

Tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan 5 (lima) tahun yang tertuang pada Renstra DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yaitu tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan
- b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana
- b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;

2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB);
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) tahun berikutnya.
4. Bahan *re-asessment* terhadap perumusan isu-isu strategis, visi dan misi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
5. Bahan *re-asessment* terhadap perumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.
6. Bahan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

B. Gambaran Umum

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kabupaten Karanganyar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

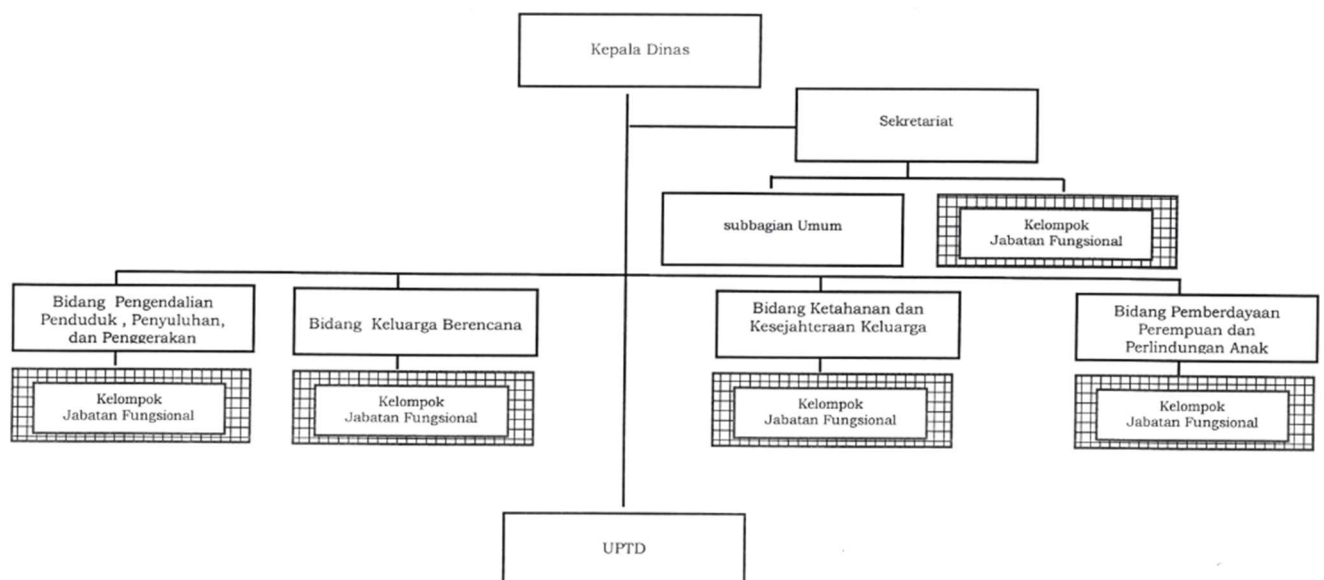
- a. perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- e. pelaksanaan fungsi Kesekretariatan;
- f. pengendalian penyelenggaran tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana susunan organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan:

- 1) Sub Bagian Umum
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Keluarga Berencana membawahkan kelompok Jabatan Fungsional
- i. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan kelompok Jabatan Fungsional
- j. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional
- k. UPTD
- l. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

3. Sumber Daya

3.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi - Misi yang ditetapkan, didukung oleh 35 orang pegawai yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu

Kepala Dinas (Eselon II) membawahi 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang (Eselon III) sebagai pelaksana teknis.

1. Sekretaris membawahi 1 orang Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional dan masing-masing Kepala Bidang membawahi kelompok jabatan fungsional.
2. Kepala Bidang dibantu kelompok jabatan fungsional sebagai sub koordinator dan dibantu staf dimana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggungjawabnya
3. Kepala Sub Bagian dibantu staf dimana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar bervariasi mulai dari pendidikan SLTA sampai dengan pendidikan S2 sebagai berikut :

Tabel. 1.1

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	16	4	12
2	S1	14	2	12
3	DIII	4	2	2
4	SLTA	1	1	0
5	SLTP	-	-	-
Jumlah		35	9	26

b. Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel 1.2

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	-	-	-
2	II	1	1	-
3	III	19	3	16
4	IV	15	4	11
Jumlah		35	8	27

3.2 Sumber Daya Modal

Tabel 1.3

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
Sarana dan Prasarana			
1	Gedung kantor (± 1.800 m²)	1	Unit
2	Mobil Kepala Dinas	1	Unit
3	Mobil Operasional Dinas	4	Unit
4	Sepeda Motor Petugas PLKB	58	Unit
5	Komputer PC	48	Buah
6	Laptop	51	Buah
7	LCD	12	Buah
8	Over Head	2	Buah
9	Kamera	9	Buah
Sarana Pelayanan			
1	Gedung Balai Penyuluh KB di Kecamatan	15	Unit
2	Gedung Gudang Alat Kontrasepsi	1	Unit
3	Mobil Pelayanan Operasi KB	1	Unit
4	Mobil Penerangan KB (Mupen)	2	Unit
5	Mobil Operasional KB (Truk Box)	2	Unit

C. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi, permasalahan pembangunan yang dihadapi tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah :

- 1) memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas;
- 2) menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga dan kualitas pelayanan;
- 3) meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- 4) meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-hak reproduksi;
- 5) meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program keluarga berencana;
- 6) mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia potensial, sejak pembuahan sampai dengan usia lanjut;
- 7) menyediakan data dan informasi keluarga;
- 8) mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender disemua bidang pembangunan;
- 9) meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga;
- 10) mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 11) mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 12) meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan;

- 13) mewujudkan pengelolaan informasi gender, anak dan keluarga berencana dan akuntabel;
- 14) meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

D. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- 2) Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 4) Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

- 10) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 11) Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2022 merupakan dokumen perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 12) Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP pembangunan yang dapat dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2) membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 4) membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 5) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- 6) analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 7) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diwujudkan dalam dokumen Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6

Tahun 2021, yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Untuk mendukung melaksanakan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, sebagaimana tetuang dalam Tabel 2.1 .

a. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja

Visi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah :

“Berjuang bersama memajukan Karanganyar“

Untuk mewujudkan visi tersebut dibawah ini keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Misi 3 : Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	✓ Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana ✓ Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	✓ Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR ✓ Prosentase Tribina Aktif
2	Misi 5: Peningkatan kualitas keagamaan, sosial, dan	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	✓ Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	✓ IDG (Indeks Pemberdaya an Gender) ✓ Prosentase ARG

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
	budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga	serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	✓ Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	terhadap APBD ✓ Kekerasan perempuan ✓ Kabupaten Layak Anak ✓ Kekerasan Anak

Tabel 2.2

Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	74,31	74,53	74,66	74,71	74,81	74,95
2	Prosentase ARG terhadap APBD	-	13,5	14	6,5	7	7,5
3	Kekerasan perempuan	0,0063	0,0084	0,0067	0,0053	0,0047	0,0042
4	Kabupaten Layak Anak	732,11	742	752	762	770	780
5	Kekerasan Anak	0,0023	0,0023	0,0061	0,0088	0,0080	0,0076
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	73,6	75	75,1	75,2	75,5	76
7	Prosentase Tribina Aktif	-	84	85	88	90	91

B. Program Unggulan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didasarkan pada dua sisi, yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal/rutin dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja DP3APPKB. Sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak serta mewujudkan keluarga kecil berkualitas di Kabupaten Karanganyar.

1. Program Umum/Rutin

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - iv. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - v. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengadaan Mebel
 - ii. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan Kegiatan :
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - ii. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Program Perlindungan Perempuan, dengan Kegiatan :

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - ii. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - ii. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- a. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan Kegiatan :
- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- i. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan Khusus Anak, dengan Kegiatan :
- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Pengendalian Penduduk, dengan Kegiatan :
- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan sub kegiatan :

- i. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - ii. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - iii. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan sub kegiatan :
 - i. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - ii. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - iii. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - iv. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - v. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - vi. Pengendalian Program KKBPK
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan :
 - i. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- i. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - ii. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - iii. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 - iv. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - v. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
 - vi. Peningkatan Kesertaan KB Pria
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan sub kegiatan :
- i. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - ii. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan Kegiatan :
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sub kegiatan :
- i. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - ii. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - iii. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

iv. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

v. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sub kegiatan :

i. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

ii. Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

iii. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

C. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 agar lebih terarah, maka visi dan misi yang terkait dengan DP3APPKB tersebut perlu dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator dan target kinerjanya. Penjabaran tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3
Skema Misi, Tujuan Dan Sasaran Serta Indikator Kinerja

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Misi 3 : Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	✓ Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana ✓ Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	✓ Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR ✓ Prosentase Tribina Aktif	✓ CPR = 74,5% ✓ Prosentase Tribina Aktif = 90%
2	Misi 5: Peningkatan kualitas keagamaan, sosial, dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	✓ Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan ✓ Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	✓ IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) ✓ Prosentase ARG terhadap APBD ✓ Kekerasan perempuan ✓ Kabupaten Layak Anak ✓ Kekerasan Anak	✓ IDG = 74,81 ✓ Prosentase ARG terhadap APBD = 7% ✓ Kekerasan perempuan = 0,0047% ✓ Kabupaten Layak Anak = 770 ✓ Kekerasan Anak = 0,0088%

D. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 adalah:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran
Tahun 2022

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung	Jumlah Sub Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	16
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1	2
3	Program Perlindungan Perempuan	2	4
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	1
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1	1
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2	2
7	Program Perlindungan Khusus Anak	3	3
8	Program Pengendalian Penduduk	2	4
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4	15
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2	8
TOTAL		24	56

E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Rencana Kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar 2022 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

F. Perjanjian Kinerja (PK) 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji Pejabat Publik, untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar 2022, disusun mengacu pada dokumen RENSTRA

Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dan dokumen Rencana Kerja DP3APPKB Tahun 2022.

Adapaun Perjanjian Kinerja Kepala DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

G. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian DP3APPKB Kabupaten Karanganyar. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah :

a. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkananya Indikator Kinerja Utama adalah sebagai pedoman dalam melakukan pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RENSTRA Tahun 2018-2023, yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

b. Cascading dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal. Pada pohon kinerja, proses perincian atau spesifikasi penyebab masalah diubah menjadi 'kinerja'. Sama halnya seperti pada proses *cascade*, dalam menyusun pohon kinerja adalah mengidentifikasi sasaran strategis atau isu strategis Perangkat Daerah yang diemban.

c. Cross Cutting Perangkat Daerah

Cross Cutting menggunakan program dan kegiatan yang memiliki tujuan sama yang menjadi fokusnya dan digunakan sebagai pedoman dalam mengukur keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RENSTRA Tahun 2018-2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Karanganyar memasuki tahun ketiga di tahun 2022. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karanganyar (RPJMD) tahun 2018-2023 yaitu **“Berjuang bersama memajukan Karanganyar”**, dengan 5 (lima) misi pembangunan daerah:

1. Pembangunan infrastruktur menyeluruh
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
3. Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis
4. Pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan
5. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja pada tahun 2022, maka dilakukan pengukuran capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tahapan sebagai berikut:

A. Metode Pengukuran

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mengacu

ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{TARGET} - (\text{REALISASI} - \text{TARGET})}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

atau

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1

Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efesiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Tabel 3.2
Sumber Penilaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Sumber Penilaian
1	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	Sumber data BPS
2	Prosentase ARG terhadap APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG (Anggaran Resposif Gender)}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$
3	Kekerasan perempuan	$\frac{\text{Jumlah Kekerasan Perempuan yang dilaporkan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$
4	Kabupaten Layak Anak	Skor dari jumlah indikator KLA tercapai
5	Kekerasan Anak	$\frac{\text{Jumlah Kekerasan anak}}{\text{Jumlah anak usia kurang dari 18 tahun}} \times 100\%$
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	$\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$
7	Prosentase Tribina Aktif	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tribina Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Kelompok Tribina}} \times 100\%$

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU Perangkat Daerah. Dari hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi

(NKO) Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah sebesar **90,86%** dengan kategori “**Baik**” sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
DP3APKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi	% Capaian
1	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	74,81	73,38	98,09
2	Prosentase ARG terhadap APBD	7	8	114,29
3	Kekerasan perempuan	0,0047	0,0046	102,13
4	Kabupaten Layak Anak	770	642,35	83,42
5	Kekerasan Anak	0,0080	0,0079	101,25
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	75,5	71,57	94,79
7	Prosentase Tribina Aktif	90	95,27	105,86
Rata-rata				99,98

Berdasarkan tabel 3.3 dari tujuh Indikator Kinerja Utama DP3APKB Kabupaten Karanganyar rata-rata capaian indikator kinerjanya 99,98 %.

Sedangkan perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama DP3APKB Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi IKU dari tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Utama	2018			2019			2020			2021			2022		
		Tar get	Rea lisa si	% Capai an	Tar get	Rea lisa si	% Capa ian	Tar get	Rea lisa si	% Capa ian	Tar get	Rea lisa si	% Capa ian	Tar get	Rea lisa si	% Capai an
1	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	74,31	74,31	100	74,52	74,52	100	74,66	74,76	100,13	74,71	74,29	99,44	74,81	73,38	98,09
2	Prosentase ARG terhadap APBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	7,75	119,23	7	8	114,29
3	Kekerasan perempuan	-	-	-	-	-	-	0,0067	0,005	125,37	0,0053	0,004	124,53	0,0047	0,0046	102,13
4	Kabupaten Layak Anak	732,11	732,1	99,99	742	742	100	752	-	-	762	757,9	99,46	770	642,35	83,42
5	Kekerasan Anak	-	-	-	-	-	-	0,0061	0,001	183,61	0,0088	0,0075	114,77	0,0080	0,0079	101,25
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	73,6	81,70	111,01	75	78,77	105,03	75,10	74,94	99,79	75,25	75,15	99,87	75,5	71,57	94,79
7	Prosentase Tribina Aktif	-	-	-	-	-	-	85	88	103,53	88	95,17	108,15	90	95,27	105,86
Rata-rata				103,67			101,68			122,49			109,35			99,98

Tabel 3.5**Perbandingan Realisasi IKU dari tahun 2022 terhadap Target Jangka Menengah (RPJMD)**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
1	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	74,81	73,38	98,09	74,95	97,91
2	Prosentase ARG terhadap APBD	7	8	114,29	7,5	106,67
3	Kekerasan perempuan	0,0047	0,0046	102,13	0,0042	90,48
4	Kabupaten Layak Anak	770	642,35	83,42	780	82,35
5	Kekerasan Anak	0,0080	0,0079	101,25	0,0076	96,01
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	75,5	71,57	94,79	76	94,17
7	Prosentase Tribina Aktif	90	95,27	105,86	91	104,69
	Rata-Rata			99,98		96,04

Selanjutnya untuk evaluasi dan analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis RENSTRA DP3APPKB Kabupaten Karanganyar 2018-2023, untuk capaian kinerja tahun 2022 akan dijelaskan dibawah ini.

C. Analisis Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 2022, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah OPD (RENSTRA) tahun 2018 – 2023. Analisis terhadap 2 (dua) tujuan dengan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RENSTRA 2018-2023 yaitu :

1. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan.

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan dari Perspektif gender digunakan beberapa indikator diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan adapun IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mendapatkan penghargaan

Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Pratama. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan Peran Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan suatu Penghargaan terhadap prakarsa dan Prestasi yang dicapai dan menunjukkan kondisi kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mencatat pada tahun 2021 capaian Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 74,29 dan menargetkan pada tahun 2022 sebesar 74,81 terealisasi sebesar 73,38. Capaian sasaran tahun 2022 sebesar 98,09% dengan capaian sasaran tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 97,91%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan dalam dunia politik dan ekonomi masih tinggi walaupun terdapat sedikit penurunan di tahun 2022 karena keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi mengalami penurunan.

b. Prosentase ARG terhadap APBD

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. ARG diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara menyeluruh, yang dilakukan melalui analisis gender.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Karanganyar mencatat pada tahun 2021 capaian prosentase ARG terhadap APBD sebesar 7,75% dan menargetkan pada tahun 2022 sebesar 7% terealisasi sebesar 8%. Capaian sasaran tahun 2022 sebesar 114,29% dengan capaian sasaran tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 106,67%.

c. Kabupaten Layak Anak

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan diskriminasi. Indonesia telah mengesahkan konvensi tentang hak anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak secara efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Indikator kabupaten layak anak meliputi : penguatan kelembagaan dan klaster hak anak meliputi

- hak sipil dan kebebasan,
- lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative,
- kesehatan dasar dan kesejahteraan,
- pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya,
- perlindungan khusus.

Pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya, penghargaan tersebut tidak lepas dari komitmen yang baik oleh Pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar menjadi Kabupaten Layak Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mencatat target score Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2022 sebesar 770 dan terealisasi sebesar 642,35. Capaian

sasaran tahun 2022 sebesar 83,42% dan capaian sasaran tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 82,35%.

2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

a. Kekerasan terhadap perempuan

Perhitungan untuk kekerasan terhadap perempuan diukur dengan jumlah kasus kekerasan pada perempuan yang dilaporkan dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali dengan 100%. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mencatat target kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 sebesar 0,0047 dan terealisasi sebesar 0,0046. Capaian sasaran tahun 2022 sebesar 102,13% dengan capaian sasaran tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 90,48%.

b. Kekerasan terhadap anak

Perhitungan untuk kekerasan terhadap anak diukur dengan jumlah kasus kekerasan anak dibagi dengan jumlah anak usia kurang dari 18 tahun dikali dengan 100%. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mencatat target rasio kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 sebesar 0,0080 dan terealisasi 0,0079. Capaian sasaran tahun 2022 sebesar 101,25% dengan capaian sasaran tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD sebesar 96,05%.

3. Meningkatnya kesetaraan Keluarga Berencana

Sejak pemerintah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) awal tahun 1970-an, angka kelahiran mengalami penurunan yang sangat berarti. Keberhasilan ini salah satunya didukung oleh keberhasilan peningkatan pemakaian alat dan obat kontrasepsi. Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu faktor antara fertilitas yang secara langsung mempengaruhi fertilitas dan dipengaruhi berbagai faktor seperti kondisi demografi, sosial, ekonomi, hukum, politik dan lingkungan.

Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Melalui sasaran strategis ini, BKKBN berupaya meningkatkan pemakaian kontrasepsi guna mengendalikan angka kelahiran.

Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu faktor antara fertilitas yang secara langsung mempengaruhi fertilitas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi demografi, sosial, ekonomi, hukum, politik dan lingkungan. Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Melalui sasaran strategis ini, DP3APPKB berupaya meningkatkan pemakaian kontrasepsi guna mengendalikan angka kelahiran.

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana. Berbagai tantangan pelayanan KB yang masih dihadapi adalah peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah, didukung tenaga kesehatan yang kompeten dan fasilitas kesehatan yang sesuai standar, serta penguatan manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi. Untuk itu, DP3APPKB berupaya menguatkan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas.

Peningkatan pengendalian penduduk melalui program KB MKJP menjadi sasaran strategis yang harus diperhatikan dari waktu ke waktu. Peningkatan peserta KB baru MKJP merupakan salah satu komponen pengendalian penduduk yang mempunyai resiko kegagalan yang rendah.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam

pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pada pasal 11 disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Sasaran strategis ini dimaksudkan agar DP3APPKB dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Karanganyar karena laju pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan kuantitas penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat akan menyebabkan pemerintah menghadapi kesulitan dalam menyediakan kebutuhan dasar penduduk seperti sandang, pangan, papan dan pekerjaan serta pendapatan rakyat. Tingkat pendapatan rendah akan menyebabkan bertambahnya pengangguran, kemiskinan dan keterbelakangan negara. Oleh karenanya, pertumbuhan penduduk harus dikendalikan agar tidak membahayakan kemajuan dan kesejahteraan.

Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu upaya dalam Program KKBPK untuk pengendalian angka kelahiran dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Metode kontrasepsi menurut jangka waktu pemakaiannya dibagi atas dua kelompok, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan metode kontrasepsi jangka pendek (Non-MKJP). Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi yang paling efektif untuk menurunkan angka kelahiran. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang adalah kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari 2 tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari 3 tahun atau mengakhiri kehamilan pada pasangan yang sudah tidak ingin tambah anak lagi. Jenis metode yang termasuk ke dalam MKJP adalah kontrasepsi mantap pria dan wanita (tubektomi dan vasektomi), Implant dan IUD(Intra Uterine Device).

Pemantauan terhadap pelayanan kontrasepsi mutlak diperlukan terutama capaian terhadap peserta KB aktif. Hal ini karena peserta KB aktif memiliki kontribusi besar dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Penggunaan kontrasepsi

jangka panjang secara langsung akan berdampak pada penurunan angka kelahiran. Pemerintah melalui DP3APPKB menekankan penggunaan MKJP bagi pasangan usia subur (PUS) untuk mengatur kelahiran maupun menghentikan kehamilan.

Masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian IKU ini. Hal ini dikarenakan pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang menghadapi banyak kendala yaitu :

- a. Akses bagi PUS untuk mendapat pelayanan kontrasepsi jangka panjang terbatas karena wilayah calon akseptor berada yang tidak terjangkau oleh sarana pelayanan medis maupun dikarenakan sarana yang tersedia tidak mendukung pelaksanaan MKJP;
- b. Masalah teknis seperti dokter dan bidan yang ditempatkan di daerah belum memiliki keahlian dalam pemasangan alat kontrasepsi MKJP;
- c. Kurangnya pengetahuan PUS mengenai alat kontrasepsi sehingga masyarakat enggan menggunakan MKJP. Mereka lebih memilih menggunakan pil atau suntik KB karena dianggap lebih praktis.

Berdasarkan hasil ini, DP3APPKB akan melakukan upaya-upaya perbaikan di periode mendatang, antara lain :

1. Memperkuat jejaring kemitraan dalam pelayanan KB berkualitas dengan kesepakatan, penggerakan, pemberdayaan fasilitas pelayanan yang ada di mitra, seperti, TNI, POLRI, Perusahaan;
2. Meningkatkan kompetensi tenaga pelayanan KB melalui pelatihan teknis medis;
3. Penguatan dukungan biaya pra pelayanan (penggerakan lapangan) khusus untuk pelayanan MKJP;
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PUS melalui konseling KB;

a. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR

Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan TFR adalah peningkatan CPR. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR adalah presentase pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat KB. Untuk perhitungannya yaitu jumlah PUS berumur 15-49 tahun yang sedang berKB dikalikan dengan 100%.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mencatat target 75,5% pada tahun 2022 dan terealisasi sebesar 71,57%. Capaian sasaran tahun 2022 sebesar 94,79% dengan capaian sasaran tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 94,17%.

Berdasarkan hasil ini, DP3APPKB akan melakukan upaya-upaya perbaikan di periode mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan kesertaan KB pasca persalinan dan pasca keguguran;
2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan KB dalam memberikan pelayanan KB yang berkualitas, melalui pelatihan medis pelayanan KB;
3. Meningkatkan pembinaan kesertaan ber-KB melalui kelompok sasaran dan fasilitas kesehatan;
4. Meningkatkan kesertaan ber-KB melalui penggerakan dalam pelayanan KB;

4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Untuk menghadapi tantangan kedepan yang semakin berat setiap keluarga harus memiliki ketahanan yang kokoh. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Sedangkan Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Tujuan dari Program pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan-kegiatan Kelompok seperti Pembinaan Keluarga Balita dan Anak, Pembinaan Ketahanan Remaja, Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Untuk mengukur peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, menggunakan indikator prosentase tribina aktif yang dihitung dengan Jumlah poktan aktif dibagi jumlah seluruh poktan dikali 100%. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mencatat target 90% pada tahun 2022 dan terealisasi sebesar 95,27%. Capaian sasaran tahun 2022 sebesar 105,86% dengan capaian sasaran tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 104,69%.

D. Akuntabilitas Anggaran

1. Anggaran DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Adapun realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 sesuai Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran DP3APPKB Kabupaten Karanganyar
Tahun Anggaran 2022 Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	16.380.614.250,00	14.267.848.749,00	87,10 %	2.112.765.501,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	16.339.701.750,00	14.229.085.749,00	87,08 %	2.110.616.001,00
5 . 1 . 01	Belanja Pegawai	4.481.470.250,00	3.945.127.436,00	88,03 %	536.342.814,00
5 . 1 . 02	Belanja Barang	11.758.231.500,00	10.183.958.313,00	88,61 %	1.574.273.187,00
5 . 1 . 05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00 %	0.00
5 . 2	BELANJA MODAL	40.912.500,00	38.763.000,00	94,75 %	2.149.500,00
5 . 2 . 02	Belanja Peralatan dan Mesin	40.912.500,00	38.763.000,00	94,75 %	2.149.500,00
5 . 2 . 03	Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0 %	0
SURPLUS / (DEFISIT)		16.380.614.250,00	14.267.848.749,00	87,10 %	2.112.765.501,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					

Per 31 Desember 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.112.372.780,00	1.931.162.220,00	91,42	181.210.560,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	129.653.787,00	118.684.031,00	91,54	10.969.756,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	229.035.000,00	210.440.000,00	91,88	18.595.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	25.710.000,00	6,300,000.00	24,05	19.410.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.325.000,00	31,380,000.00	97.30%	871,000.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	83.065.740,00	75.896.160,00	91,37	7.169.580,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.137.861,00	19.464.143,00	96,65	673.718
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.363,00	23.879,00	94,15	1.484,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	87.154.686,00	85.936.275,00	98,60	1.218.411,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.393.936,00	3.959.036,00	90,10	434.900,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.181.853,00	11.877.135,00	90,10	1.304.718,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7,940,275.00	-	0.00%	7,940,275.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.648.534.642,00	1,313,211,268.00	91.37%	124,008,732.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.776.827,00	1.692.220,00	95,24	84.607,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	61.425.000,00	58.500.000,00	95,24	2.925.000,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.825.000,00	6.500.000,00	95,24	325.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.912.500,00	13.250.000,00	95,24	662.500,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	87.098.500,00	86.969.600,00	99,85	128.900,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	16.765.500,00	4.228.500,00	25,22	12.537.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	44.940.000,00	44.940.000,00	100	0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.960.100,00	2.167.000,00	73,21	793.100,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.758.050,00	2.503.700,00	90,78	74.350,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan	8.462.000,00	8.065.000,00	95,31	397.000,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	62.436.500,00	61.011.500,00	97,72	1.425.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	57.036.900,00	56.698.200,00	99,41	338.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	216.724.100,00	214.587.950,00	99,01	2.136.150,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.096.000,00	11.969.500,00	98,95	126.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.267.750,00	14.211.000,00	99,60	56.750,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.636.900,00	7.566.000,00	99,07	70.900,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.000.000,00	2.000.000,00	100	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	505.970.000,00	412.879.000,00	81,60	93.091.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.150.000,00	6.477.500,00	70,79	2.672.500,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	73.655.000,00	68.230.260,00	92,63	5.424.740,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.127.000,00	1.058.000,00	93,88	69.000,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.512.852.000,00	1.472.865.000,00	97,36	39.987.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.652.000,00	15.493.000,00	98,98	159.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	25.000.000,00	25.000.000,00	100	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	79.600.000,00	57.935.00,00	72,78	21.665.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	995.820.000,00	995.820.000,00	100,00	0.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.002.700,00	7.779.300,00	97,21	223.400,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	135.600.000,00	135.600.000,00	100	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	-	0,00	3.600.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	267.120.000,00	267.120.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	50.400.000,00	50,400,000.00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	50.000.000,00	49.800.000,00		200.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.752.000,00	1.295.244,00	73,93	456.756,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	20.790.000,00	4.701.400,00	22,61	16.088.600,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	94.752.000,00	64.641.407,00	68,22	30.110.593,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.664.380.000,00	2.655.818.936,00	99,68	8.561.064,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	25.800.000,00	21.717.900,00	84,18	4.082.100,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	943.877.300,00	700.055.200,00	74,17	243.822.100,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	650.000,00	650.000,00	100	0.00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	150.000,00	150.000,00	100	0.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	38.150.000,00	33.950.000,00	88,99	4.200.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25.811.200,00	25.685.000,00	99,51	3,342,500.00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000,00	4.235.000,00	99,18	100,000.00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	500.000,00	0	0	500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000,00	3.575.000,00	97,95	75.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.450.000,00	3.435.000,00	99,57	15.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	345.821.000,00	330.504.366,00	95,57	15.316.634,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.166.957.000,00	2.139.628.850,00	67,56	1.027.328.150,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.520.000,00	10.520.000,00	100	0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah Bersifat Perlombaan	13.500.000,00	13.500.000,00	100	0
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	119,100,000.00	85.200.000,00	71,54	33.900.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	5,000,000.00	520.000,00	10,4	4.480.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	23.900.000,00	22.818.000,00	95,47	1.082.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	5.000.000,00	4.980.000,00	99,6	20.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	4.500.000,00	4.485.000,00	99,67	15.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.500.000,00	3.480.000,00	99,43	20.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.012.500,00	3.000.000,00	74,77	1.012.500,00
TOTAL		16.380.614.250,00	14.267.848.749,00	87,10	2.112.765.501,00

Tabel 3.5**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Tujuan**

No	Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Effisiensi Anggaran (%)
1	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	93,63	95,05	4,95
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	105,86	92,55	7,45
2	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	98,6	94,66	5,34
		Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	101,69	51,26	48,75

Tabel 3.7
Analisa Efisiensi Dan Efektif
Tahun Anggaran 2022 Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2022

No	Uraian	Anggaran			Realisasi		Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih anggaran (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)	
	BELANJA ASLI DAERAH						
	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
1	Gaji dan Tunjangan	2.748.996.281	2.496.747.879	252.248.402	100,00	90,82	EFF/EFI
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.650.311.469	1.370.129.557	280.181.912	100,00	83,02	EFF/EFI
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	82.162.500	78.250.000	3.912.500	100,00	95,24	EFF/EFI
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.481.470.250	3.945.127.436	536.342.814	100,00	88,03	EFF/EFI
	BELANJA LANGSUNG / KEGIATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	733.361.300	212.321.100	30.677.088	100,00	94,96	EFF/EFI
4	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	24.000.000	21.239.000	2.701.000	100,00	88,75	EFF/EFI
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	24.000.000	21.239.000	2.701.000	100,00	88,75	EFF/EFI
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.000.000	17.857.500	142.500	100,00	99,21	EFF/EFI
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.000.000	17.857.500	142.500	100,00	99,21	EFF/EFI
6	Administrasi Umum Perangkat	221.500.000	215.080.034	6.419.966	100,00	97,10	EFF/EFI

No	Uraian	Anggaran			Realisasi		Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih anggaran (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)	
	Daerah						
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	9.688.300	311.700	100,00	96,88	EFF/EFI
	Penyediaan bahan logistik kantor	10.000.000	9.125.000	875.000	100,00	91,25	EFF/EFI
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	21.841.400	158.600	100,00	99,28	EFF/EFI
	Fasilitasi kunjungan tamu	14.500.000	14.433.000	67.000	100,00	99,54	EFF/EFI
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	165.000.000	159.992.334	5.007.666	100,00	96,97	EFF/EFI
7	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	41.000.000	38.763.000	2.237.000	100,00	94,54	EFF/EFI
	Pengadaan Mebel	8.000.000	7.965.000	35.000	100,00	99,56	EFF/EFI
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	33.000.000	30.798.000	2.202.000	100,00	93,33	EFF/EFI
8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	210.215.000	197.364.578	12.850.422	100,00	93,89	EFF/EFI
	Penyediaan jasa surat menyurat	28.375.000	28.375.000	0	100,00	100,00	EFF/EFI
	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	87.680.000	74.994.878	12.685.122	100,00	85,53	EFF/EFI
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	94.160.000	93.994.700	165.300	100,00	99,82	EFF/EFI
9	Program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	218.646.300	212.320.100	6.326.200	100,00	96,26	EFF/EFI
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	113.826.300	108.448.500	5.377.800	100,00	95,28	EFF/EFI

No	Uraian	Anggaran			Realisasi		Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih anggaran (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12.000.000	11.245.000	755.000	100,00	93,71	EFF/EFI
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	92.820.000	92.626.600	193.400	100,00	99,79	EFF/EFI
	PROGRAM PENGARUSUTAMANAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	40.000.000	37.241.200	2.758.800	100,00	93,10	EFF/EFI
10	Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	37.241.200	2.758.800	100,00	93,10	EFF/EFI
	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	15.000.000	13.416.000	1.584.000	100,00	89,44	EFF/EFI
	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	25.000.000	23.825.200	1.174.800	100,00	95,30	EFF/EFI
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	74.791.000	34.840.000	39.951.000	100,00	46,58	EFF/EFI
11	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	25.740.000	25.290.000	450.000	100,00	96,02	EFF/EFI
	Koordinasi dan sinronisasi pelaksanaan kebijakan program & kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup daerah Kabupaten/Kota	15.740.000	15.740.000	0	100,00	100,00	EFF/EFI
	Advokasi kebijakan & pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	10.000.000	9.550.000	450.000	100,00	95,50	EFF/EFI

No	Uraian	Anggaran			Realisasi		Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih anggaran (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)	
12	Penyediaan layanan rujukan Lanjutan bagi Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	49.051.000	9.550.000	39.501.000	100,00	19,47	EFF/EFI
	Penyediaan Layanan Pegaduan Masyarakat bagi petrempuan Korban Kekerasan Kab/Kora	10.000.000	9.550.000	450.000	100,00	95,50	EFF/EFI
	Koordinasi Dan sinkonisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi peremuan Korban kekeraan Kewenangan Kab/ Kota	39.051.000	00	39.051.000	100,00	0,00	EFF/EFI
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100.000.000	100.000.000	0	100,00	100,00	EFF/EFI
13	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	0	100,00	100,00	EFF/EFI
	PElaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	0	100,00	100,00	EFF/EFI
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	14.400.000	14.400.000	0	100,00	100,00	EFF/EFI
14	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat	14.400.000	14.400.000	0	100,00	100,00	EFF/EFI

No	Uraian	Anggaran			Realisasi		Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih anggaran (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)	
	Daerah Kabupaten/Kota						
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	14.400.000	14.400.000	0	100,00	100,00	EFF/EFI
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	140.000.000	130.948.500	9.051.500	100,00	93,53	EFF/EFI
15	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	30.329.500	4.670.500	100,00	86,66	EFF/EFI
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	35.000.000	30.329.500	4.670.500	100,00	86,66	EFF/EFI
16	Program penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	105.000.000	100.619.000	4.381.000	100,00	95,83	EFF/EFI
	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/kota	105.000.000	100.619.000	4.381.000	100,00	95,83	EFF/EFI
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	90.674.000	50.715.050	39.958.950	100,00	55,93	EFF/EFI
17	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah	18.126.250	18.125.000	1.250	100,00	94,52	EFF/EFI

No	Uraian	Anggaran			Realisasi		Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih anggaran (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)	
	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/ Kota	18.126.250	18.125.000	1.250	100,00	99,99	EFF/EFI
18	Penyediaan layanan anak bagi anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah kab/ Kota	39.518.700	00	39.518.700	100,00	0,00	EFF/EFI
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota	39.518.700	00	39.518.700	100,00	0,00	EFF/EFI
19	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/ Kota	33.029.050	32.590.050	439.000	100,00	98,67	EFF/EFI
	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	33.029.050	32.590.050	439.000	100,00	98,67	EFF/EFI
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	286.328.000	275.922.634	10.405.366	100,00	96,37	EFF/EFI
20	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	10.000.000	9.993.100	6.900	100,00	99,93	EFF/EFI

No	Uraian	Anggaran			Realisasi		Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih anggaran (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)	
	Penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	10.000.000	9.993.100	6.900	100,00	99,93	EFF/EFI
21	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	276.328.000	265.929.534	10.398.466	100,00	96,24	EFF/EFI
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	10.000.000	9.567.300	432.700	100,00	95,67	EFF/EFI
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	129.128.000	128.981.500	146.500	100,00	99,89	EFF/EFI
	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	137.200.000	127.380.734	9.819.266	100,00	92,84	EFF/EFI
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.665.769.700	5.310.027.457	355.742.243	100,00	93,72	EFF/EFI
22	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1.033.687.000	989.748.075	43.938.925	100,00	95,75	EFF/EFI
	Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	34.375.000	30.217.000	4.158.000	100,00	87,90	EFF/EFI
	Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	35.000.000	34.302.000	698.000	100,00	98,01	EFF/EFI
	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	85.640.000	84.578.000	1.062.000	100,00	98,76	EFF/EFI
	Pelaksanaan Mekanisme	271.672.000	271.320.000	352.000	100,00	99,87	EFF/EFI

No	Uraian	Anggaran			Realisasi		Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih anggaran (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)	
	Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						
	Pengelolaan Operasional & sarana di Balai penyuluhan KKBPK	567.000.000	529.331.075	37.668.925	100,00	93,36	EFF/EFI
	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	40.000.000	00.00	100,00	100,00	EFF/EFI
23	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.661.649.000	1.661.649.000	00.00	100,00	100,00	EFF/EFI
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.661.649.000	1.661.649.000	00.00	100,0	100,0	EFF/EFI
24	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kab/kota	1.903.183.700	1.591.529.260	311.654.440	100,00	83,62	EFF/EFI
	Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	56.900.000	55.800.000	1.100.000	100,00	98,07	EFF/EFI
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1.750.783.700	1.444.709.260	306.074.440	100,00	82,52	EFF/EFI
	Penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	5.000.000	520.000	4.480.000	100,00	10,40	EFF/EFI
	Pembinaan Pelayanan Keluarga	13.000.000	13.000.000	0	100,00	100,00	EFF/EFI

No	Uraian	Anggaran			Realisasi		Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih anggaran (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)	
	Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	5.000.000	5.000.000	0	100,00	100,00	EFF/EFI
	Peningkatan kesertaan KB Pria	72.500.000	72.500.000	0	100,00	100,00	EFF/EFI
25	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	1.067.250.000	1.067.101.122	148.878	100,00	99,99	EFF/EFI
	Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	15.000.000	14.851.122	148.878	100,00	99,01	EFF/EFI
	Pelaksanaan & Pengelolaan Program KKBPK Di Kampung KB	1.052.250.000	1.052.250.000	00.00	100,00	100,00	EFF/EFI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	4.753.820.000	3.665.942.260	1.087.877.400	100,00	87,93	EFF/EFI
26	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan & Kesejahteraan keluarga	4.684.320.600	3.596.924.860	1.087.395.740	100,00	76,79	EFF/EFI
	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PEK/UPPKS)	507.000.000	414.050.000	92.950.000	100,00	81,67	EFF/EFI

No	Uraian	Anggaran			Realisasi		Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih anggaran (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)	
	Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PEK/UPPKS)	15.000.000	14.439.700	560.300	100,00	96,26	EFF/EFI
	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	4.142.320.600	3.148.674.100	993.646.500	100,00	76,01	EFF/EFI
	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PEK/UPPKS)	10.000.000	9.966.000	34.000	100,00	99,66	EFF/EFI
	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orangtua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	10.000.000	9.795.060	204.940	100,00	97,95	EFF/EFI
27	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	69.499.400	69.017.400	482.000	100,00	99,06	EFF/EFI
	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam	10.000.000	10.000.000	0,00	100,00	100,00	EFF/EFI

No	Uraian	Anggaran			Realisasi		Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih anggaran (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)	
	penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PEK/UPPKS)						
	Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PEK/UPPKS)	49.499.400	49.247.400	252.000	100,00	99,49	EFF/EFI
	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	10.000.000	9.770.000	230.000	100,00	97,70	EFF/EFI
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	11.899.144.000	10.322.721.313	1.576.422.687	100,00	86,75	EFF/EFI
	TOTAL BELANJA	16.380.614.250	14.267.848.749	2.112.765.501	100,00	87,10	EFF/EFI

Tabel 3.8
Realisasi Capaian Program Tahun 2022

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Anggaran	%	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.214.831.550	4.647.811.648	94,21	
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	40.000.000	37.241.200	93,10	
3	Program Perlindungan Perempuan	74.791.000	34.840.000	46,58	Terdapat dana SILPA DAK PPPA tahun 2021, tetapi terdapat <i>double</i> anggaran dengan POLRES untuk <i>e-visum</i> sehingga tidak dapat terealisasi.
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100.000.000	100.000.000	100,00	
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	14.400.000	14.400.000	100,00	
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	140.000.000	130.948.500	93,53	
7	Program Perlindungan Khusus Anak	90.674.000	50.715.050	55,93	Terdapat dana SILPA DAK PPPA tahun 2021, tetapi terdapat <i>double</i> anggaran dengan POLRES untuk <i>e-visum</i> sehingga tidak dapat terealisasi.
8	Program Pengendalian Penduduk	286.328.000	275.922.634	96,37	

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Anggaran	%	Keterangan
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.665.769.700	5.310.027.457	93,72	
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.753.820.000	3.665.942.260	87,93	Terdapat dana DAK BOKB untuk biaya operasional pendampingan TPK pada calon pengantin, ibu hamil, dan ibu pasca persalinan yang tidak dapat terserap maksimal karena target yang besar daripada penduduk yang ada dan memenuhi persyaratan untuk pendampingan
TOTAL		16.380.614.250	14.267.848.749	87,10	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama RENSTRA 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen RENSTRA, kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar pada akhir perencanaan jangka menengah Tahun 2022 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) misi, 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata tercapai 99,98% atau kategori **“Baik”**. Pencapaian target kinerja untuk tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp 16.380.614.250,- dan terealisasi Rp 14.267.848.749,- atau 87,10% .

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yang ditunjukkan oleh seluruh Bidang dan Seksi serta Kesekretariatan, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kepala DP3APPKB Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam RENSTRA DP3APPKB Kabupaten Karanganyar 2018-2023.

B. Progres Penyelesaian Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RENSTRA DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, pada Tahun 2022 progres penyelesaian terhadap Isu Strategis OPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Peningkatan frekuensi kegiatan advokasi dan KIE Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi semua lapisan masyarakat.
3. Mendekatkan tempat pelayanan dengan masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi serta situasi wilayah.

4. Mengaktifkan kegiatan Pusat Konsultasi Remaja.
5. Peningkatan kualitas SDM dengan cara pelatihan bagi petugas pengelola dan pelaksana Program Pemberdayaan Perempuan.

Karanganyar, Januari 2023

KEPALA DP3APPKB

KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. AGAM BINTORO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650601 199203 1 007